

ABSTRAK

UBP Nikel Maluku Utara, Site Pakal Merupakan Unit. PT Aneka tambang (Persero) Tbk, Yang bergerak di Industri pertambangan bijih nikel. Metode yang digunakan adalah penambangan open cast. dimana sangat berpotensi mengubah bentuk alam dan menimbulkan pencemaran. Untuk itu perlu melakukan reklamasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik 78 Tahun 2010, tentang reklamasi dan pascatambang. Serta mewajibkan perusahaan pertambangan menyerahkan sejumlah dana sebagai jaminan reklamasi.

Penelitian tesis ini dilakukan mevaluasi kesesuaian biaya jaminan reklamasi izin usaha pertambangan nikel yang telah di serahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur. Metode penelitian meliputi penelitian lapangan, wawancara dengan pejabat berwenang bertugas dalam pembahasan jaminan reklamasi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Halmahera Timur dan evaluasi perhitungan biaya reklamasi UBP Nikel Maluku Utara mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2014. komponen biaya reklamasi meliputi biaya langsung yang terdiri dari biaya penataan lahan, revegetasi, pekerjaan sipil, sedangkan biaya tidak langsung yang terdiri dari biaya mobilisasi dan demobilisasi, perencanaan reklamasi, administrasi dan keuntungan pihak ketiga secara biaya supervise.

Hasil perhitungan Penelitian di mulai tahun 2014-2018 dapat diperoleh sebesar Rp.8.348.784.752.- sedangkan jaminan reklamasi UBP Nikel Maluku Utara yg di serahkan pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2014-2018 hingga saat penelitian dilakukan sebesar Rp.2.755,416.520.- berdasarkan evaluasi perhitungan jaminan reklamasi operasi produksi UBP Nikel Maluku Utara, Site Pakal memiliki perbedaan yang cukup besar, sehingga terdapat kekurangan selesi sebesar Rp.5.593.368.323.- Oleh karena itu penyusunan rencana reklamasi tersebut dinilai tidak sesuai standar harga barang dan jasa Kabupaten Halmahera Timur, berdasarkan dengan SK Bupati Nomor 188.45/030-70/2014.

Manfaat penelitian adalah agar tidak ada perbedaan perhitungan jaminan reklamasi dengan kondisi actual di lapangan sehingga keberhasilan dapat tercapai. Dan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara dalam mengambil kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.